

JURISPRUDENTIE

Jurusan Hmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

Andi Syafrani

Perlindungan konsumen dalam persaingan usaha industri jasa penerbangan

Andi Sri Rezki Wulandari

Perlindungan hukum nasabah dalam penggunaan kontrak baku pada perum pegadaian di Kabupaten Sidrap

Andi Takdir Jufri

Pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo

Anggraeni Arif

Analisis yuridis pengrusakan hutan (*deforestasi*) dan degradasi hutan terhadap lingkungan

Erlina

Pendaftaran terhadap merek yang bersifat *generic* dan *descriptive*

Jumadi

Makna istilah dan bahasa hukum dalam kontek keadilan

Muhammad Ilyas

Eksekusi tanah terhadap putusan serta merta

Muhammad Sabir

Pemahaman hadis tentang salat tasbih

(Studi Kasus dijamaah Pengajian di Mesjid Al-Qausar Kecamatan Tallo Kelurahan Wala-Walaya, Makassar)

Marwah

Asas iktikad baik dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah

Mira Nila Kusuma Dewi

Tinjauan yuridis atas tindakan tentara Amerika Serikat terhadap tawanan perang Irak

Munir

Adat sebagai wadah perekat untuk mempertahankan ikatan kesatuan Republik Indonesia

St. Nurjannah

Lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Rahmatullah

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perkara waris

Volume

3

Nomor

1

Makassar

Juni 2016

ISSN

2355-9640

Munir	
Adat sebagai wadah perekat untuk mempertahankan ikatan kesatuan Republik Indonesia.....	109-118
Nurjannah	
Lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.....	119-125
Rahmatullah	
Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perkara waris.....	126-133

ADAT SEBAGAI WADAH PEREKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN IKATAN PERSATUAN REPUBLIK INDONESIA

Drs. H. Munir Salim,MH

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

Indigenous is a whole system of ideas, actions, and results of human creation to fill life by learning all of things consist of community life. According Hardjito Notopuro Customary Law is an unwritten law. Customary law with a characteristic is a guideline of life for the people in holding the justice system and social welfare and family-oriented. The shape and arrangement of the legal community are a common law union bound by factors that are territorial and genealogy. Regents / Mayors can form a Committee of Indigenous People Regency / City which served to make the identification, verification and validation of Indigenous Peoples. The results of the verification and validation, and then submitted to the Regional Head. Indeed Fifth Pancasila Sila is the quintessence Digest or Indigenous. This is the National Indigenous us, the indigenous, and Adat Indonesia that does not mean that beyond the fifth of these advantages, there is no other seed-featured. Each region has other-featured.

Keywords: *Indigenous, Law, Society, Pancasila*

Abstrak:

Adat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar dimana kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis. Hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Bupati/Walikota dapat membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat. Hasil verifikasi dan validasi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah. Sesungguhnya Kelima Sila Pancasila adalah Intisari atau Saripati Adat. Inilah Adat Nasional kita, Adat Nusantara, dan Adat Indonesia yang tidak berarti bahwa diluar kelima keunggulan tersebut, tidak ada unggulan-unggulan lain. Setiap daerah memiliki unggulan-unggulan lain.

Kata Kunci: *Adat, Hukum, Masyarakat, Pancasila*